

COLLABORATIVE GOVERNANCE DALAM PENGEMBANGAN KEWIRASAHAAN TERPADU DI KECAMATAN PANCORAN KOTA ADMINISTRASI JAKARTA SELATAN

Handoko Dwi Susantyo¹; Ermaya Suradinata²; Megandaru W Kawuryan³

Program Pascasarjana Institut Pemerintahan Dalam Negeri Jakarta

¹*email : handokodwi@gmail.com*

Paper Accepted: 25 Juni 2022

Paper Reviewed: 03-09 Juli 2022

Paper Edited: 10-19 Juli 2022

Paper Approved: 22 Juli 2022

ABSTRAK

Judul penelitian ini “Collaborative Governance dalam Pengembangan Kewirausahaan Terpadu di Kecamatan Pancoran Kota Administrasi Jakarta Selatan”. Adapun permasalahan dalam penelitian ini yaitu bagaimana penerapan collaborative governance dalam pengembangan kewirausahaan terpadu, Apa saja faktor penghambat dan pendukung collaborative governance dalam pengembangan kewirausahaan terpadu dan strategi apa yang digunakan untuk mendukung collaborative governance dalam pengembangan kewirausahaan terpadu. Penelitian ini menggunakan desain penelitian kualitatif dengan metode deskriptif melalui pendekatan induktif. Penelitian dalam memperoleh informasi menggunakan non probability sampling dengan menggunakan teknik purposive. Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa collaborative governance dalam pengembangan kewirausahaan terpadu dilaksanakan dengan actor Unit Pengelola Penaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu, Satuan Pelaksana Perindustrian Usaha Mikro Kecil Menengah dan Perdagangan, Satuan Pelaksana Sosial, Bank DKI. Terdapat faktor penghambat yaitu indicator governance, sharing of information dan trust among participant. Berdasarkan faktor penghambat tersebut disusun strategi dengan penyusunan standart operasional procedure dalam setiap tahapan program, adanya monitoring dan evaluasi bersama serta edukasi kepada masyarakat untuk merubah paradigma dalam pemberdayaan ekonomi.

Kata Kunci : collaborative governance, pengembangan kewirausahaan terpadu, governance, sharing of information, trust among participants

PENDAHULUAN

Latar Belakang

Dalam perkembangan tata kelola pemerintahan, konsep collaborative governance menjadi trend dan fenomena baru yang menarik. Di seluruh negara baik negara maju maupun berkembang penerapan

collaborative governance menjadi kian populer. Collaborative Governance sendiri menjadi berkembang pesat dikarenakan pemerintah membutuhkan kerja sama dengan stakeholder lainnya dalam penyelenggaraan urusan pemerintahan, baik urusan wajib maupun urusan pilihan.

Salah satu masalah besar yang dihadapi oleh negara Indonesia adalah persoalan pengangguran. Pengangguran merupakan dampak dari jumlah angkatan kerja yang tumbuh lebih cepat daripada kesempatan kerja.

Berdasarkan data BPS 2015, tingkat pengangguran terbuka di DKI Jakarta mencapai sebesar 368.190 orang. Dengan adanya permasalahan mengenai tingkat pengangguran terbuka yang tinggi pada Provinsi DKI Jakarta akan mengakibatkan tingkat kesenjangan yang besar pula. Permasalahan tersebut menjadikan gubernur dan wakil gubernur membutuhkan suatu kolaborasi, hal ini dikarenakan kolaborasi merupakan bagian penting dari manajemen sektor publik. Kolaborasi yang dimaksud merupakan suatu upaya atau usaha dalam rangka pengembangan sektor kewirausahaan. Dalam hal ini kewirausahaan merupakan salah satu gerakan ekonomi yang berbasis masyarakat yang berinvestasi dalam pengembangan sumber daya manusia dan pembangunan ekonomi berdasarkan kebijakan ekonomi pemerintah.

Wirausaha diyakini sebagai roda penggerak pertumbuhan ekonomi, serta wirausaha juga dianggap sebagai inovator dalam pengembangan ekonomi. Tingginya persentase jumlah wirausaha di suatu negara maka perekonomian negara tersebut akan tumbuh dengan baik (Casson et al, 2006).

Implementasi Collaborative Governance salah satunya adalah collaborative governance dalam pelaksanaan kebijakan pengembangan kewirausahaan terpadu (gerakan Ok Oce). Gerakan Ok Oce merupakan sebuah gerakan ekonomi kerakyatan berbasis teknologi informasi untuk menciptakan lapangan kerja baru berbasis kewirausahaan di Indonesia dengan konsep ekonomi berbagi (sharing economy) yang di jalankan dengan ekosistem yang melibatkan empat unsur dan pada akhirnya akan memberikan manfaat ekonomi sekaligus manfaat sosial dan budaya untuk masyarakat Indonesia.

Gerakan Ok Oce merupakan gerakan yang dibentuk dengan tujuan untuk

menciptakan 200.000 lapangan kerja baru selama kurun waktu 5 (lima) tahun. Program Ok Oce merupakan salah satu upaya dalam menurunkan jumlah pengangguran di DKI Jakarta. Gerakan Ok Oce berkolaborasi dengan masyarakat, penggerak OK OCE, pemerintah, dan pihak swasta. Kolaborasi dalam kewirausahaan terpadu penting digalakan mengingat pertumbuhan wirausaha baru di Provinsi DKI Jakarta mengalami stagnasi.

Meskipun demikian, dalam implementasinya, Gerakan Ok Oce tersebut masih dihadapkan berbagai permasalahan, antara lain; belum optimalnya collaborative governance antara pemerintah, swasta dan masyarakat dalam program Ok-Oce / peningkatan kewirausahaan terpadu.

Perumusan Masalah

Berdasarkan uraian latar belakang penelitian di atas, maka didapat rumusan masalah yaitu sebagai berikut.

- 1) Bagaimana proses collaborative governance atau tata kelola pemerintahan kolaboratif dalam pengembangan kewirausahaan terpadu di Kecamatan Pancoran Kota Administrasi Jakarta Selatan ?
- 2) Faktor-faktor apa saja yang mendukung dan menghambat collaborative governance dalam pengembangan kewirausahaan terpadu di Kecamatan Pancoran Kota Administrasi Jakarta Selatan ?
- 3) Bagaimana upaya peningkatan tata kelola kolaboratif antara pemerintah, swasta dan masyarakat dalam program pengembangan kewirausahaan terpadu.

METODE PENELITIAN

Penelitian ini merupakan penelitian deskriptif kualitatif. Istilah deskriptif berasal dari bahasa Inggris to describe yang berarti memaparkan atau menggambarkan sesuatu

hal (Arikunto, 2010:3). Desain penelitian ini adalah penelitian survei. Penelitian survei merupakan salah satu bentuk penelitian deskriptif, yang memaparkan apa yang terdapat atau terjadi dalam sebuah kancanah, lapangan, atau wilayah tertentu. Data yang terkumpul diklasifikasikan menurut jenis, sifat, atau kondisinya. Sesudah datanya lengkap, kemudian dibuat kesimpulan (Arikunto, 2010:3).

Sumber data yang akan diperoleh dalam penelitian ini menggunakan Person dan Paper. Sedangkan berdasarkan cara memperolehnya, data terdiri dari data primer dan data sekunder. Dari keseluruhan sumber data itu, digunakan untuk dapat menjawab secara jelas dan terperinci sesuai dengan tujuan dari penelitian yang penulis laksanakan. Informan yang ditentukan untuk diwawancara dalam penelitian ini menggunakan purposive sampling, dengan pertimbangan dan tujuan tertentu. Informan yang diambil melalui teknik purposive untuk diwawancara sebanyak 15 (lima belas) orang.

HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

Proses Collaborative Governance dalam Pengembangan Kewirausahaan Terpadu di Kecamatan Pancoran

Pembahasan mengenai proses collaborative governance dalam pengembangan kewirausahaan terpadu di Kecamatan Pancoran dimulai dari analisis terhadap actor-aktor yang berperan dalam proses kolaborasi. Sesuai dengan elemen good governance dimana terdapat 3 elemen yaitu pemerintah-swasta (dunia usaha)-masyarakat, maka dalam penelitian ini juga akan dibahas actor kolaborasi dari 3 unsur tersebut.

Pemerintah

Berdasarkan Peraturan Gubernur Provinsi DKI Jakarta No. 2 Tahun 2020 tentang Penyelenggaraan Pengembangan

Kewirausahaan Terpadu Pasal 5 Ayat (1) disebutkan bahwa Perangkat daerah penyelengara PKT (Pengembangan Kewirausahaan Terpadu) terdiri atas :

- a. Dinas Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah serta Perdagangan Provinsi
- b. DKI Jakarta
- c. Dinas Perindustrian dan Energi Provinsi DKI Jakarta
- d. Dinas Ketahanan Pangan, Kelautan dan Pertanian Provinsi DKI Jakarta
- e. Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi Provinsi DKI Jakarta
- f. Dinas Pariwisata dan Kebudayaan Provinsi DKI Jakarta
- g. Dinas Pemberdayaan, Perlindungan Anak dan Pengendalian Penduduk
- h. Provinsi DKI Jakarta
- i. Dinas Sosial Provinsi DKI Jakarta

Susunan pelaku Collaborative Governance pada tingkat Kecamatan adalah sebagai berikut :

- a. Satuan Pelaksana Perindustrian, Perdagangan, Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah
- b. Satuan Pelaksana Ketahanan Pangan, Kelautan dan Pertanian
- c. Satuan Pelaksana Sosial

Proses kolaborasi dalam Program Pengembangan Kewirausahaan Terpadu dimulai dengan tahapan sosialisasi, tahapan sosialisasi dilakukan pada tingkat Kelurahan dan Tingkat Kecamatan. Sosialisasi mengenai program pengembangan kewirausahaan terpadu tersebut melibatkan unsur dari Kelurahan setempat (dalam hal ini umumnya dihadiri oleh Kepala Seksi Ekonomi, Pembangunan dan Lingkungan Hidup), Satuan Pelaksana Perindustrian dan UMKM, Unit Pelaksana PTSP, Bank DKI dan masyarakat. Pada tahap sosialisasi materi yang dibawakan adalah 7 tahapan Pengembangan Kewirausahaan Terpadu (P7) yang dibawakan oleh Satpel Perindustrian UMKM.

Masyarakat

Kolaborasi masyarakat dalam program pengembangan kewirausahaan terpadu dilakukan pada saat masyarakat berperan sebagai peserta sosialisasi, peserta pelatihan hard skill maupun soft skill dan pendamping kewirausahaan. Peran masyarakat sebagai peserta sosialisasi pada umumnya sangat baik. Antusiasme masyarakat dalam mengikuti setiap tahapan sosialisasi sangat baik dan peserta sosialisasi aktif dalam bertanya dan mengikuti seluruh rangkaian kegiatan.

Mayoritas peserta sosialisasi dari jenis kelamin perempuan. Ditemukan kekurangan dalam proses sosialisasi yakni terkadang kegiatan menjadi tidak focus dikarenakan para ibu-ibu membawa serta anaknya.

Keberhasilan salah satu tahapan sosialisasi dapat dilihat dari sejauh mana masyarakat pasca pelatihan memperoleh Izin Usaha Mikro dan Kecil sebagai bukti legalitas berusaha dari Pemerintah Provinsi DKI Jakarta. Apabila melihat rekapitulasi dari jumlah IUMK yang berhasil diperoleh oleh peserta, maka terdapat gap antara jumlah peserta sosialisasi dengan output IUMK yang dikeluarkan oleh UP PMPTSP Kelurahan.

Dalam pengamatan peneliti tidak terdapat perwakilan disabilitas selama sosialisasi dan pelatihan yang dilakukan di tiap kelurahan. Keterwakilan disabilitas diperlukan karena pengembangan kewirausahaan terpadu ini merupakan bentuk dari pemberdayaan disabilitas. Sebagai saran untuk ke depannya dilakukan perluasan peserta sosialisasi dari disabilitas.

Dunia Usaha

Bentuk kolaborasi dengan dunia usaha pada program pengembangan kewirausahaan terpadu dapat ditemukan dalam proses sosialisasi, pelatihan, pemasaran dan permodalan. Kolaborasi yang dilakukan pada tahapan sosialisasi yakni dengan menggandeng Bank DKI yang memberikan materi mengenai Kredit Usaha Rakyat. KUR adalah program pemerintah dalam memberikan kredit dengan bunga sangat terjangkau untuk usaha. Tujuan KUR adalah

memberikan akses kredit, inklusi keuangan, kepada pengusaha kecil dan menengah yang selama ini tidak bisa mengambil kredit ke bank.

Pemberian fasilitas permodalan dalam hal ini Kredit Usaha Rakyat masuk ke dalam tahapan P7. Kredit Usaha Rakyat dalam penyalurnya ternyata terdapat moral hazard, bahwa penyaluran KUR yang seharusnya tidak dilakukan untuk kegiatan konsumtif saat ini beberapa salah sasaran untuk kegiatan konsumtif.

Kolaborasi dalam hal pemasaran dilakukan dengan menggandeng market place, yaitu Bukalapak, Shopee, dan Tokopedia. Penulis belum memperoleh informasi dari narasumber terkait mengenai apakah ada UMKM peserta pengembangan kewirausahaan terpadu dari Kecamatan Pancoran yang sudah berhasil listing di dalam marketplace tersebut. Hal ini dikarenakan keterbatasan sumber daya dan adanya pandemic Covid 19.

Faktor-Faktor Pendukung dan Penghambat Collaborative Governance Dalam Pengembangan Kewirausahaan Terpadu di Kecamatan Pancoran

Untuk menjawab pertanyaan penelitian mengenai faktor pendukung dan penghambat dalam kolaborasi pada program pengembangan kewirausahaan terpadu maka Penulis menggunakan teori dari De Seve (2007). Kolaborasi akan dilihat dari 8 indikator berdasarkan teori tersebut. Berikut akan dilakukan penjabaran.

Networked Structure

Prinsip networked structure dapat dilihat dari proses tahapan sosialisasi dan permodalan. Pada tahapan sosialisasi antara narasumber tidak terdapat hierarki karena masing-masing memiliki pelaporan dan pertanggungjawaban ke SKPD masing-masing. Hal ini dapat dilihat dari wawancara peneliti dengan Bpk. Ferdinand Renald :

"Pada program pengembangan kewirausahaan terpadu masing-masing SKPD yang terlibat menyesuaikan dengan tugas dan fungsi masing-

masing, Dinas PUMKMP hanya bersifat sebagai coordinator. Untuk KSD ini dibawah Asisten Perekonomian” (Wawancara, 2020).

Terkait dengan prinsip Networked Structure maka di satu sisi menjadi faktor pendukung, di satu sisi menjadi faktor penghambat. Rekomendasi penulis adalah dalam menyusun program unggulan agar tidak melibatkan pihak eksternal dalam permodalan, akan tetapi Pemprov DKI Jakarta memiliki sejarah moral hazard di dalam penyaluran dana PPMK (Program Pemberdayaan Ekonomi Masyarakat Kelurahan) Bina Ekonomi, dimana terdapat tunggakan sampai dengan 245,6 Miliar.

Commitment to Common Purpose

Kolaborasi antara Pemerintah Provinsi DKI Jakarta, masyarakat dan dunia usaha dilatarbelakangi oleh kesamaan Visi dan misi. Kesamaan visi tersebut dapat dilihat dari Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah yang tercantum dalam Perda No. 1 Tahun 2018.

Variabel commitment to common purpose juga terlihat dari wawancara peneliti dengan peserta pelatihan Ok-Oce atas nama Ibu Unani dari Kelurahan Duren Tiga : “*Secara umum pelatihan Ok-Oce ini baik sekali karena terdapat sinergitas antara orang Kelurahan, PTSP, Ok-Oce dan Sudin. Materi pelatihan soft skill yang saya terima tadi juga sangat berguna terkait dengan pemasaran dan hard skill mengenai cara produksi makanan yang higienis. Mudah-mudahan saya juga ada rezeki saya di Ok-Oce ini*” (Wawancara Penulis, 2020).

Peneliti melihat adanya antusiasme warga dalam mengikuti pelatihan dan program pengembangan kewirausahaan terpadu, disamping itu berdasarkan wawancara di atas juga tergambar kontribusi dan komitmen bersama atas satu tujuan dari para stake holders.

Trust Among Participant

Dalam sebuah kolaborasi diperlukan adanya rasa saling percaya antar stake holders, berdasarkan temuan di lapangan terdapat perubahan kepercayaan masyarakat dalam melihat program pengembangan

kewirausahaan terpadu di Kecamatan Pancoran, hal ini terlihat dari wawancara dengan pendamping UMKM Yudhis : “*Jika dilihat dari antusiasme mengikuti pelatihan, memang sangat baik, terbukti dari setiap event sosialisasi selalu memenuhi target kuota, akan tetapi kami merasa kesulitan menghadapi peserta pasca sosialisasi dan pelatihan. Hal ini dikarenakan warga masih ingin hal nyata dari pemerintah dalam bentuk (bantuan) langsung kepada masyarakat, apakah bentuknya etalase warung, atau alat-alat dapur dan lain-lain. Agak repot kalo membujuk ikut pelatihan soft skill seperti Teknik pemasaran, pentingnya sertifikat halal, kalo hard skill seperti pembuatan minuman Kesehatan atau pelatihan kuliner mereka semangat*”(Wawancara, 2020).

Melihat temuan di lapangan seperti itu maka penulis melihat bahwa Ok-Oce mulai kehilangan rasa kepercayaan di masyarakat. Masyarakat melihat bahwa Ok-Oce ini adalah bantuan permodalan semata, bukan merupakan ekosistem kewirausahaan. Warga Kecamatan Pancoran secara sederhana melihat bahwa pasca pelatihan saya harusnya sudah bisa memeroleh bantuan permodalan, sementara Pemerintah Provinsi DKI Jakarta merancang program ini adalah sebuah pemberdayaan ekonomi. Aspek trust among participant menjadi faktor penghambat dalam kolaborasi yang terjadi. Setiap upaya pembangunan ekonomi wilayah mempunyai tujuan utama untuk meningkatkan jumlah dan jenis peluang kerja untuk masyarakat daerah.

Governance

Aspek governance yang penulis lihat menjadi aspek yang menghambat proses kolaborasi. Belum adanya SOP pada masing-masing tahapan menjadi rentan terjadinya maladministrasi terutama dalam hal red tape, yaitu penyelenggaran pelayanan yang berbelit-belit, dalam waktu yang lama yang seharusnya dapat diselesaikan secara singkat. Sampai dengan penulisan karya tulis ini belum ada aturan yang secara signifikan mengatur tahapan penyelenggaraan pengembangan kewirausahaan terpadu.

Access To Authority

Access to authority dapat diartikan adanya akses atau kesempatan yang terbuka kepada pihak-pihak yang berwenang. Kesempatan atau akses yang terbuka menjadi salah satu indikator berhasil atau gagalnya kolaborasi. Saat ini dengan perkembangan teknologi dan informasi serta adanya keterbukaan terhadap informasi public, maka penyelenggara negara wajib membebrikan informasi secara berkala dan informasi sewaktu-waktu. Akses untuk mendapatkan informasi tentang program pengembangan kewirausahaan terpadu saat ini sangat mudah, sudah terdapat website khusus terkait ok-oce/ saat ini dikenal dengan jakpreneur.

Akses terhadap pemegang otoritas juga dilakukan oleh Dinas PMPTSP dengan membuka layanan Call Center 1500-164, call center ini dapat dimanfaatkan untuk menanyakan persyaratan, perkembangan permohonan dan pengaduan jika ditemukan masalah administrasi. Aspek access to authority adalah faktor yang mendukung dalam program pengembangan kewirausahaan terpadu.

Distributive Accountability / Responsibility

Distributive accountability / responsibility atau pembagian terhadap pelaporan dan pertanggung jawaban menjadi salah satu aspek yang menunjang keberhasilan atau kegagalan kolaborasi. Dalam variable distribusi terhadap akuntabilitas dan pertanggungjawaban dilihat peran Dinas PUMKMP tidak optimal, karena tudi pembinaan dan pengembangan UMKM masuk ke dalam tudi Dinas ini. Hal ini tercantum di dalam Peraturan Gubernur No. 266 tahun 2016 tentang Organisasi dan Tata Kerja Dinas

Koperasi Usaha Kecil Menengah dan Perdagangan Pasal 3 angka 2 huruf (d) melaksanakan pembangunan, pengembangan, pembinaan, perlindungan koperasi, usaha mikro, kecil dan menengah serta perdagangan. Sampai dengan penulisan

karya ilmiah ini tidak diketahui alasan secara signifikan mengenai kesulitan pemberian rekomendasi penerbitan IUMK di Dinas PUMKMP.

Information Sharing

Information sharing, atau sharing terhadap informasi adalah adanya saling berbagi terhadap akses informasi. Sharing terhadap informasi dalam kolaborasi pengembangan kewirausahaan terpadu dapat dilihat dari wawancara berikut : *"Secara umum sharing informasi sudah berjalan lancar, sudah ada WAG antara pendamping kewirausahaan, ptsp dan satpel umkm, yang dirasakan kurang adalah sharing informasi dengan level suku dinas, baru terdapat satu kai pertemuan dengan suku dinas PUKMP terkait dengan IUMK dan pertemuan tersebut juga tidak menghasilkan suatu titik temu"* (wawancara dengan Rini, Kel Pancoran, 2020).

Terkait dengan information sharing, maka terdapat hambatan di dalam kolaborasi.

Access to Resources

Access to resources atau akses terhadap sumber daya adalah ketersediaan sumber daya baik teknis, keuangan, sdm dan sumber daya serta potensi lainnya yang diperlukan untuk mendukung kolaborasi. Adanya dukungan sumber daya keuangan menjadi faktor pendukung dalam kolaborasi.

Upaya peningkatan Collaborative Governance dalam Pengembangan Kewirausahaan Terpadu

Berdasarkan analisis yang terdapat dalam matriks maka upaya untuk meningkatkan kolaborasi dalam pengembangan kewirausahaan terpadu dilakukan dengan memperkuat indikator Governance, Sharing of Information dan trust among participants. Berikut akan dijabarkan masing-masing indikator yang memerlukan peningkatan.

Governance

Indikator governance memiliki kekurangan dalam aspek Pelatihan, hal ini ditemukan setelah tahap penelitian bahwa tidak terdapat SOP dalam setiap tahapan. Sebagai contoh apabila pemohon gagal dalam tahap P7 (permodalan) apa solusi yang diberikan oleh Pemerintah Daerah. Apakah harus tetap dalam tahapan P 6 (pelaporan keuangan). Hal inilah yang menjadi kendala dalam penerapan pengembangan kewirausahaan terpadu, semua pemohon harus start dari P1 yaitu pendaftaran.

Saat ini Pemerintah Provinsi DKI Jakarta sedang melakuka re branding terhadap pengembangan keirausahaan terpadu, re branding itu dilakukan dengan cara bahwa P1 smpai dengan p7 itu bukanlah tahapan, dalam artian program disesuaikan dengan assessment yang dilakukan di tahap awal. Pemohon yang hanya membutuhkan permodalan silahkan mengikuti p 7, sementara pemohon yang masih start up silahkan diikuti dari P1. Solusi ini bisa menjadi solusi terhadap gap yang terjadi antara pednaftaran yang jumlahnya 20.000, perizinan yang 8.000 dan permodalan yang kisaran 600.

Sharing of Information

Sharing of information adalah indicator yang kurang dalam tahapan perizinan, hal ini ditemui dalam wawancara bahwa tidak ada forum monev antar stake holders. Sampai dengan penelitian ini dilakukan masih belum terdapat forum rapat kordinasi atau rapat evaluasi yang dilakukan. Sesuai dengan Perhub No. 2 Tahun 2020 tentang Pengembangan kewirausahaan terpadu maka hal ini dapat dilakukan oleh Suku Dinas PUMKMP. Monitoring adalah kegiatan pemantauan untuk memperoleh informasi secara terus-menerus sehingga hasil sesuai dengan tujuan yang telah ditetapkan.

Evaluasi yaitu kegiatan penilaian di akhir kegiatan untuk melihat pencapaian dari program yang dijalankan.

Trust among participants

Indikator trust among participants harus ditingkatkan pada tahapan permodalan. Hal ini dikarenakan adanya konsepsi yang salah di dalam masyarakat mengenai pemberdayaan ekonomi. Di sisi lain terdapat juga moral hazard dari kegagalan program PPMK pada tahun 2000-an. Pemberdayaan masyarakat merupakan upaya untuk mendirikan masyarakat lewat perwujudan potensi kemampuan yang mereka miliki, hal ini berarti bahwa masyarakat diperdayakan untuk melihat dan memilih sesuatu yang bermanfaat bagi dirinya. Dengan memakai logika ini, dapat dikatakan bahwa masyarakat yang berdaya adalah masyarakat yang dapat memilih dan mempunyai kesempatan untuk mengadakan pilihanpilihan.

KESIMPULAN DAN SARAN

Berdasarkan hasil penelitian dan pembahasan yang telah diuraikan sebelumnya, maka dapat disimpulkan bahwa:

1. Collaborative Governance dalam Pengembangan Kewirausahaan Terpadu sudah melibatkan stakeholders pemerintah, masyarakat dan swasta dan sudah berjalan dengan baik namun belum optimal :
 - a. Collaborative Governance dalam Pengembangan Kewirausahaan Terpadu dalam tahap pelatihan sudah dilaksanakan pelatihan di 6 Kelurahan se Kecamatan Pancoran dengan antusiasme peserta yang baik. Dalam tahapan pelatihan dilakukan kolaborasi dengan actor Unit Pelaksana PMPTSP Kelurahan, Satpel Perindustrian UMKM, Satpel Sosial dan Bank DKI;
 - b. Collaborative Governance dalam pengembangan kewirausahaan terpadu dalam tahap perizinan sudah diterbitkan 298 Izin Usaha Mikro dan Kecil
 - c. selama tahun 2019 oleh 6 Kelurahan;

- d. Collaborative governance dalam pengembangan kewirausahaan terpadu dalam tahapan permodalan sampai dengan penelitian dilakukan melalui mekanisme Kredit Usaha Rakyat belum terdapat pemohon yang berasal dari program pengembangan kewirausahaan terpadu yang sampai dalam tahapan P 7/ permodalan.
2. Faktor penghambat Collaborative Governance dalam Pengembangan Kewirausahaan Terpadu yakni :
- a. Tahapan Pelatihan
 - 1) Indikator Governance harus ditingkatkan, hal ini dikarenakan belum adanya SOP / Standart Operational Procedure dalam tiap tahapan mulai dari pendataan sampai dengan permodalan;
 - 2) Ketiadaaan SOP tersebut menyebabkan rentan terjadinya maladministrasi.
 - 3) Perlu dirumuskan juga apabila pemohon tidak lulus dalam tahapan tertentu maka solusinya seperti apa.
 - b. Tahapan perizinan terdapat indicator sharing of information yang kurang, hal ini disebabkan tidak adanya forum rapat kordinasi dan rapat monev dalam program pengembangan kewirausahaan terpadu. Peran Dinas Perindustrian UMKMP sebagai coordinator belum optimal;
 - c. Tahapan permodalan terdapat indicator trust among participant yang kurang, hal ini disebabkan terjadinya distrust di masyarakat mengenai program pemberdayaan ekonomi masyarakat, di sisi yang lain akibat kegagalan program ppmk maka pemerintah mengkhawatirkan terjadinya moral hazard.
3. Strategi untuk meningkatkan collaborative governance dalam pengembangan kewirausahaan terpadu, yaitu:
- a. Pembuatan Standar Operational Prosedur setiap tahapan mulai dari Pendataan sampai dengan permodalan, hal ini dikarenakan program pengembangan kewirausahaan terpadu merupakan kegiatan strategis daerah dan apabila belum terdapat sop maka rentan terjadinya maladministrasi.
 - b. Penyeenggaran forum rapat koordinasi dan monitoring dan evaluasi untuk melihat sejauhmana implementasi program dan hambatan yang terjadi di lapangan.
 - c. Meningkatkan komunikasi dan koordinasi dengan stakeholders serta menciptakan ruang komunikasi yang terbuka dengan masyarakat atau kelompok/organisasi kemasyarakatan dalam forum dialog atau sosialisasi peraturan/kebijakan dan informasi, juga menjaring aspirasi dengan menerima saran atau masukan dan keluhan.
 - d. Edukasi pada masyarakat untuk merubah paradigma dan membuat masyarakat lebih berdaya.

Saran yang dapat diberikan penulis terkait pelaksanaan Collaborative Governance dalam Pengembangan Kewirausahaan Terpadu adalah :

- a) Dalam tahapan pelatihan selain pertemuan tatap muka juga dibuat e learning sehingga masyarakat dengan tingkat edukasi dan kemampuan teknologi informasi yang baik dapat mengakses
- b) Dalam tahapan perizinan maka saran yang dapat dilakukan adalah penguatan fungsi Dinas Perindustrian Usaha Mikro Kecil Menengah dan Perdagangan sebagai coordinator program.
- c) Dalam tahapan permodalan maka dibutuhkan alternatif selain Bank

DKI dalam penyaluran Kredit usaha rakyat

DAFTAR PUSTAKA

- Ansell, Chris., Gash, Alison. 2007. Collaborative Governance in Theory and Practice. *Journal of Public Administration Research and Theory*.
- Arikunto, Suharsimi. 2010. Prosedur Penelitian: Suatu Pendekatan Praktik. Jakarta: Rineka Cipta.
- Emerson, K., T. Nabatchi., Balogh, Stephen. 2011. An Integrative Framework for Collaborative Governance. *Journal of Public Administration Research and Theory*. Sranko, George R. 2011. Collaborative Governance and a Strategic Approach to Facilitating Change : Lesson Learned from Forest Agreements in South East Queensland and the Great Bear Rainforest. *Journal Interface Vol 3 No 2*.
- Harmaizar. 2008. Menangkap Peluang Usaha. Jakarta : CV Dian Anugrah Prakasa.
- Imanda, Ramadhan., Faizah, Siti Inayatul. 2015. Motivasi Pengusaha Dalam Pengembangan Inovasi Produk (Penelitian Deskriptif Terhadap Pengusaha Garmen Muslim Di Gresik). *Jurnal Jestt. Vol.2 No. 5*.
- Kurniati, Edy Dwi. 2015. Kewirausahaan Industri, Yogyakarta : Deepublish.
- Manurung, Adler Haymans. 2008. Modal untuk Bisnis UKM. Jakarta : PT Kompas Media Nusantara.
- Miles, Matthew B; Huberman, A Michael. 2009. Analisis Data Kualitatif: Buku Sumber tentang Metode-Metode Baru. Jakarta: UI Press.
- Morse, Ricardo S., Stephens, Jhon. 2012. Teaching Collaborative Governance : Phases, Competencies, and Case-Based Learning. *Journal of Public Affairs Education Vol 18 No 3*.
- Prawirosentono, Suryadi. 2008. Kebijakan Kinerja Karyawan. Yogyakarta : BPFE. *Collabrotaive Public Management : Where Have We Been and Where Are We Going?*. SAGE : The American Review of Public Administration 2012 42:507. American Society for Public Administration.
- Selden, S., Sowa, J., dan Sandfort, J. 2006. The Impact of Nonprofit Collaborative in early child care and and Education on Management and Program Outcomes. *Public Administration Review*.
- Silvia, Chris. 2011. Development, Knowledge, Partnership, and Change : In Search of Collaborative Approaches to Environmental Governance, Latin American Research review. Vol.46(1) ABI/INFORM complete.
- Soegoto. Eddy Soeryanto. 2009. Entrepreneurship: menjadi Pebisnis Ulung. Jakarta : PT Elex Media Komputindo.
- Sudarmo. 2011. Isu-Isu Administrasi Publik. Solo: Smart Media.
- Sugiyono. 2009. Metode Penelitian Bisnis (Pendekatan Kuantitatif, Kualitatif, dan R&D). Bandung: Alfabeta.
- Sugiyono. 2010. Metode Penelitian Bisnis (Pendekatan Kuantitatif, Kualitatif, dan R&D). Bandung: Alfabeta.
- Sugiyono. 2011. Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif dan R & D. Bandung: Alfabeta.
- Suharyadi, dkk. 2007. Kewirausahaan: Membangun Usaha Sukses Sejak Usia Muda. Jakarta:Salemba Empat.
- Wijatno, Serian. 2009. Pengantar Entrepreneurship. Jakarta:PT Gramedia Widiasarana Indonesia.